

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

A. 1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹

Menurut Simons, yang dimaksud dengan *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²

Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-

¹Teguh Prastyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 50

²Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 56

undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.³

Sebagaimana yang dimaksud beberapa pendapat ahli diatas, penulis sependapat dengan pendapat Simons, karena melawan hukum menurut penulis artinya segala perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Dalam hal ini bagi remaja yang melakukan tindak pidana dimana tindak pidana tersebut diakibatkan oleh minuman keras, maka dia dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum artinya perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan dapat dipidanakan.

Sedangkan menurut penulis, pendapat Barda Nawawi Arif pengertiannya lebih ditekankan kepada seseorang yang melakukan ataupun tidak melakukan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan undang-undang maka bisa dikenakan sanksi, artinya adalah jika seseorang tidak melakukan melainkan memerintah seseorang ataupun suatu kelompok untuk melakukan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan undang-undang maka dapat dikenakan sanksi dan dapat dipidanakan sesuai ketentuan kitab undang-undang hukum pidana.

A. 2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum pidana mengenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis, Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan.⁴ Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam

³Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 37

pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan.

Adapun beberapa unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi :⁵

- a. Ada perbuatan;
- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembeda;
- d. Mampu bertanggungjawab;
- e. Kesalahan;
- f. Tidak ada alasan pemaaf;

Lain halnya dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup criminal act, dan criminal responsibility tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembeda.

Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi :⁶

- a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembeda;

Sesuai ketentuan unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan dualistis dan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, maka penulis menyimpulkan bahwa seseorang dapat

⁴Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm 38.

⁵Ibid, hlm 43.

⁶Ibid, hlm 45.

dikenakan pidana jika telah memenuhi 3 (tiga) unsur tindak pidana itu sendiri sama halnya dengan pertanggungjawaban, namun jika seseorang tidak memenuhi 3 unsur ataupun salah satu unsur yang sudah dijelaskan dari pandangan dualistik dan pertanggungjawaban pidana, maka seseorang belum bisa dipidanakan sampai putusan hakim yang bersifat *incracht*. Namun, ada pandangan lain dari beberapa ahli terkait unsur-unsur tindak pidana diantaranya dilihat dari subjektif dan objektifnya suatu tindak pidana. Ada pendapat beberapa ahli tentang unsur-unsur tindak pidana antara lain :

Menurut Lamintang unsur-unsur Subjektif, dari suatu tindak pidana itu adalah :⁷

- a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :⁸

- a. Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisararis dari perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

⁷P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan III, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 194.

⁸Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm 48.

Menurut R.Tresna unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :⁹

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Menurut W.P.J Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :¹⁰

- a. Unsur melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*), dan
- b. Unsur Kesalahan (*Schuld*).

Selanjutnya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi: ¹¹

- a. Mampu bertanggungjawab;
- b. Kesalahan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli di atas, maka penulis mengambil intisari dari penjelasan para pendapat-pendapat diatas yaitu, bahwasannya kita ketahui tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum dan diancam dengan pidana, penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum serta memberikan efek jera bagi pelakunya. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam

⁹Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm 80.

¹⁰Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 105.

¹¹Amir Ilyas, *Op.cit*, hlm 49.

unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni: unsur-unsur Subyektif dan unsur-unsur Obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur Subyektif itu adalah unsur-unsur yang melakat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur Obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

B. Tinjauan Umum Tentang Faktor Kriminologi di Kalangan Remaja

B. 1 Pengertian Remaja

Masa remaja (adolescence) adalah merupakan masa yang sangat penting dalam rentang kehidupan manusia, merupakan masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju kemasa dewasa. Ada beberapa pengertian menurut para tokoh-tokoh mengenai pengertian remaja.

Remaja mempunyai arti yang sangat luas, yakni mencakup kematangan mental, sosial, emosional, pandangan ini di ungkapkan oleh Piaget dengan mengatakan, Secara psikologis, masa remaja adalah usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua melainkan berada dalam tingkat yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah integrasi dalam masyarakat (dewasa) mempunyai aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber, termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok. Transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja ini memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam

hubungan sosial orang dewasa, yang kenyataannya merupakan ciri khas yang umum dari periode perkembangan ini.¹² Hal senada juga di kemukakan oleh Jhon W. Santrock, remaja ialah periode perkembangan transisi dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa yang mencakup perubahan-perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional.¹³

Begitu juga pendapat dari (World Health Organization) WHO 1974 remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksualitas sampai saat ini mencapai kematangan seksualitasnya, individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa, dan terjadi peralihan dari ketergantungan sosial yang penuh, kepada keadaan yang relative lebih mandiri.¹⁴

B. 2 Batas Usia Remaja

Apabila berbicara tentang remaja, seringkali timbul pertanyaan, umur berapakah seseorang dikatakan remaja atau batasan usia berapakah seseorang dapat di katakan sebagai remaja. Menanggapi hal tersebut, berdasarkan beberapa peraturan hukum Indonesia, maka batasan-batasan mengenai kedewasaan seseorang adalah :

¹²Elizabeth B. Hurlock, 2003, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta, Erlangga, hlm 206.

¹³Jhon W. Santrock, 2002, *Adolescence Perkembangan Remaja*, Jakarta, Erlangga, hlm 23.

¹⁴Sarwono Sarlito W, 2004, *Psikologi Remaja*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 9.

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵
- b. Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu menikah. Apabila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.¹⁶
- c. Syarat usia memperoleh Surat Izin Mengemudi, 17 tahun untuk SIM A, Sim C dan SIM D, 20 tahun untuk SIM B I, dan 21 tahun untuk SIM B II.¹⁷
- d. Untuk mengikuti pemilihan umum syarat usia minimum yaitu 17 tahun atau sudah menikah.¹⁸
- e. Usia minimum bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria.¹⁹

Setelah mengamati beberapa batasan usia berdasarkan peraturan-peraturan hukum tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa secara hukum seseorang telah benar-benar dewasa pada saat berumur di atas dua puluh satu tahun atau telah terlebih dahulu menikah,

¹⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Pasal 1 ayat 1

¹⁶Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330.

¹⁷Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 81.

¹⁸Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Pasal 1.

¹⁹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7.

jadi masa remaja itu sendiri dapat diklasifikasikan sebagai masa pada saat seseorang berumur sebelum dua puluh satu tahun atau tidak terlebih dahulu menikah.

Dalam kajian psikologi, secara umum untuk masyarakat Indonesia batasan usia remaja adalah usia 11-24 tahun dan belum menikah, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :²⁰

1. Usia 11 tahun adalah usia ketika pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak (kriteria fisik).
2. Di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balig, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial).
3. Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri, tercapainya fase genital dari perkembangan psikoseksual, dan tercapainya puncak perkembangan kognitif maupun moral (kriteria psikologis).
4. Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberikan peluang bagi mereka yang sampai pada batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa (secara adat/tradisi), belum bisa memberikan pendapat sendiri dan sebagainya.

Dalam definisi tersebut diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa status pernikahan sangat menentukan karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat kita pada

²⁰Sarlito W Sarwono, 2012, *Psikologi Remaja*, Jakarta, hlm 18-19.

umumnya. Seorang yang sudah menikah pada usia berapapun dianggap an diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Karena itu definisi remaja disini dibatasi khusus untuk yang belum menikah.

Sedangkan berdasarkan UU NO. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, sekaligus sebagai dasar dalam penelitian ini untuk menentukan batasan usia mengklasifikasikan seseorang sebagai remaja yang dalam istilah hukum disebut anak, diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 3 UU NO. 11 Tahun 2012 yaitu:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Berdasarkan hal tersebut maka remaja/anak sebagai objek dalam penelitian ini adalah yang berusia mulai 12 - 18 tahun. Sehingga, berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012, pada rentang usia tersebut seorang anak yang melakukan tindak pidana diproses dan diadili dalam sistem peradilan pidana anak.

B. 3 Pengertian Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju

perkembangan kejahatan. Seorang antropolog yang berasal dari Prancis, bernama Paul Topinard mengemukakan bahwa :²¹

Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu sendiri berdasar etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.²²

Berdasarkan isi kutipan menurut Soedjono Dirdjosisworo dan Paul Topinard di atas, penulis berpendapat bahwa Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, Pada dasarnya sangat tergantung pada disiplin ilmu-ilmu lainnya yang mempelajari kejahatan, bahkan dapat dikatakan bahwa keberadaan kriminologi itu merupakan hasil dari berbagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan tersebut. Dengan demikian, kriminologi itu bersifat “interdisipliner”, artinya suatu disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, melainkan hasil kajian dari ilmu lainnya terhadap kejahatan. Jadi, Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu terhadap suatu objek yang sama, yakni kejahatan.

²¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011, *Kriminologi*, Jakarta, PT Rajawali press, hlm 9.

²²Indah Sri Utari, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa Media, hlm 20.

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (crime and criminal). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “the body of knowledge” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara interdisipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta. Kriminologi dengan cakupan kajiannya; a. orang yang melakukan kejahatan, b. penyebab melakukan kejahatan, c. mencegah tindak kejahatan, d. cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.²³

Pengertian kriminologi yaitu mengandung pengertian yang sangat luas, dikatakan demikian karena dalam mempelajari kejahatan tidak dapat terlepas dari pengaruh dan sudut pandang. Ada yang memandang kriminologi dari sudut perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.²⁴

W.A. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.²⁵

Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup :

- a. Antropologi kriminal
- b. Sosiologi kriminal

²³Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, hlm 14.

²⁴Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Jakarta, Aksara Baru, hlm 9.

²⁵*Ibid*, hlm 9.

- c. Psikologi kriminal
- d. Penologi
- e. Kriminalistik

Moeljatno, mengemukakan bahwa kriminologi adalah “sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian rupa dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja”.²⁶

Berdasarkan isi kutipan definisi Kriminologi menurut W.A. di atas, penulis berusaha menganalisa maksud dari masing-masing definisi Kriminologi yang disebut di atas sebagai berikut:

1. Antropologi kriminal

Penulis mencoba mengartikan definisi Antropologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia yang jahat dimana kejahatan di lihat dari aspek sejarah atau dengan kata lain kejahatan adalah suatu bagian dari ilmu alam.

2. Sosiologi kriminal

Penulis mencoba mengartikan definisi dari Sosiologi kriminal yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, jadi pada intinya ilmu yang mempelajari tentang sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat dalam arti luas Sosiologi kriminal ini juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan Psychology.

3. Psikologi kriminal

²⁶Moeljatno, 1986, *Kriminologi*, Jakarta, PT Bina aksara, hlm 3.

Penulis mencoba mengartikan definisi Psychlogi Kriminil yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang dipandang dari sudut pandang ilmu jiwa, (Umpamanya, bila dibutuhkan untuk memberi keterangan pada hakim) jadi, Psychlogi Kriminil dengan kata lain adalah pengetahuan ilmu jiwa dari orang-orang lain di pengadilan sebagai saksi, pembela dan lain-lain serta tentang pengakuan seseorang.

4. Penologi

Penulis mencoba mengartikan definisi Penologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman/pemidanaan serta system atau cara bagaimana memperlakukan orang-orang yang sedang dalam mengetahuikonsep-konsep dasar system/cara memperlakukan narapidana di penjara menjalani hukuman (narapidana).

5. Kriminalistik

Penulis mencoba mengartikan definisi Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan untuk dilaksanakannya teknik menyelidik kejahatan yang pengusutan kejahatan yang merupakan gabungan ilmu jiwa tentang kejahatan, dan penjahat dan lain-lain.

Sutherland berpendapat bahwa :

Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat (sosial). Ilmu meliputi : ²⁷

1. Cara proses membuat undang-undang,
2. Pelanggaran terhadap undang-undang, dan
3. Reaksi terhadap pelanggaran–pelanggaran ini, hal-hal mana merupakan 3 segi pandangan (aspek) dari suatu rangkaian hubungan timbal balik yang sedikit banyak merupakan suatu kesatuan.

Berdasarkan pendapat dari Sutherland di atas, penulis berpendapat bahwa proses pembuatan Undang-undang seharusnya melihat dari gejala tingkah laku masyarakat dan

²⁷*Ibid*, hlm 4.

reaksi dari masyarakat karna dalam pasal 303 KUHP belum lah efektif karna perilaku kejahatan perjudian bukanya berkurang namun makin menjamur di kalangan anak yang masi di bawah umur. jadi, menurut penulis pemerintah seharusnya lebih tegas membuat dalam pembuatan Undang-Undang tentang perjudian yang lebih membuat efek jera terhadap masyarakat.

Menurut Moeljatno, “Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu.”²⁸

Kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika diklasifikasikan, kriminologi merupakan bagian dari ilmu sosial, akan tetapi kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Kriminologi merupakan bagian dari kurikulum program studi ilmu hukum yang perlu diajarkan bagi sekolah tinggi hukum atau bagi aparat penegak hukum.

Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang(selanjutnya disebut UU). Pelaku kejahatan dibahas dari segi penyebab seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

²⁸*Ibid*, hlm 6.

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah suatu gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual.

Jadi, berdasarkan uraian singkat di atas, penulis menyimpulkan bahwa ilmu kriminologi merupakan bidang ilmu yang cukup penting dipelajari, karena dengan adanya kriminologi, dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan dalam pelaksanaan hukum pidana.

B. 4 Pengertian Kejahatan

Kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan. Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Definisi kejahatan menurut R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni : ²⁹

²⁹R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia Bogor, hlm 3.

Sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis, menurut R.Soesilo, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Berdasarkan isi kutipan definisi R.Soesilo di atas, penulis berpendapat bahwa kejahatan dari sudut pandang yuridis adalah suatu perilaku masyarakat yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Sedangkan dari sudut pandang sosiologis kejahatan tersebut dapat membuat kerugian untuk si pelaku dan juga masyarakat karna hilangnya keseimbangan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat yang mana perbuatan kejahatan tersebut bertentangan dengan konsitusi.

Pendapat beberapa ahli tentang pengertian kejahatan :

1. Menurut Soesilo ada dua pengertian kejahatan, yaitu pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang.³⁰ Ditinjau dari segi sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.
2. Menurut Bemmelem kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam

³⁰Husein Syahrudin, 2003, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm 22.

masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, Negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.³¹

3. Menurut Elliot kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.³²
4. Menurut Bonger kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.³³
5. Menurut Moeliono kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).³⁴

Berdasarkan pendapat ahli tentang pengertian kejahatan menurut Soesilo, Bemmelem, Elliot, Bonger dan Moeliono di atas, penulis berupaya menyimpulkan bahwa Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan hukum positif Indonesia dan lebih tegasnya, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

³¹*Ibid*, hlm 23

³²*Ibid*, hlm 24

³³*Ibid*, hlm 24.

³⁴Topo Santoso dan Eva Achjani, 2001, *Kriminologi*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.35.

B. 5 Teori Penyebab Kejahatan

Dalam perkembangannya kriminologi telah menghasilkan banyak teori yang berbeda satu sama lainnya. Hal ini disebabkan karena disamping sudut pandang yang berbeda dalam mengkaji kejahatan, juga dikarenakan metode ataupun kondisi dimana teori itu muncul yang berbeda. Perbedaan teori ini terus akan berkembang paralel dengan tingkat dinamika perkembangan masyarakat. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat beberapa teori kriminologi tentang penyebab kejahatan yakni :³⁵

1. Teori Kontrol Sosial Dan Containment

Pengertian teori kontrol atau control theory merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal perkembangan tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial atau control theory merujuk kepada permasalahan kejahatan dan kenakalan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan “peergroups”.³⁶

Berdasarkan pengertian teori kontrol di atas, penulis berpendapat bahwa teori kontrol sosial ini mengkaji pertanyaan mengapa hanya sebagian orang yang taat pada norma. Maka para penganut teori ini akhirnya beranggapan bahwa pencurian bisa dilakukan oleh siapa saja, bahwa kenakalan-kenakalan bisa dilakukan oleh siapa saja dan bahwa penyalahgunaan obat-obatan terlarang bisa dilakukan juga oleh siapa saja.

Pertanyaannya justru mengapa orang mentaati norma di tengah banyak cobaan, bujukan dan tekanan pelanggaran norma. Jawabannya adalah bahwa anak-anak muda dan orang dewasa mengikuti hukum sebagai respon untuk mengikuti kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah dan hilang.

³⁵Romli Atmasasmita, 2005, *Definisi kriminologis*, Bandung, Tarsito, hal. 43

³⁶*Ibid*, hlm 47.

.³⁷ Berkaitan dengan teori ini Reis Ramli Atmasasmita, membedakan dua macam control

1. Personal control adalah kemampuan seseorang untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara tidak melanggar norma- norma yang berlaku dimasyarakat.
2. Sosial Control adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

Berdasarkan Teori dari Reis Ramli Atmasasmita di atas, penulis berpendapat bahwa, pangkal dari teori ini adalah suatu kemampuan seseorang yang melakukan sesuatu untuk mencapai keinginannya dengan tidak melanggar kaidah dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dengan kata lain bahwa masyarakat mengetahui akan sebab akibat yang akan terjadi ketika mereka melakukannya.

2. Teori Differential Association

Differential association (asosiasi yang berbeda) yang berusaha menjawab mengapa terdapat individu yang menyetujui perbuatan yang melanggar hukum dalam masyarakat.³⁸ “Menurut teori ini bahwa tingkah laku kriminal adalah sama dengan tingka laku non-kriminal yang di peroleh melalui proses belajar.”

Pada perkembangannya teori ini terdapat dua versi yaitu yang dikemukakan pada tahun 1939 dan pada tahun 1947. Versi kedua yang dikemukakan pada tahun 1947 telah menetengahkan sembilan pernyataan sebagai berikut :³⁹

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari.

³⁷Atmasasmita, Romli, 1983, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta, Rajawali, hlm 30

³⁸Kartini Kartono, 2001, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13.

³⁹*Ibid*, hlm 15.

- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi.
- d. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok lain.
- e. Mempelajari tingkah laku kriminal, termaksud didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi dorongan atau alasan pembeda.
- f. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan dan menyukai atau tidak menyukai.
- g. Seorang menjadi 'delinquent' karena penghayatan terhadap peraturan perundang-undangan; lebih suka melanggar dari pada mentaatinya.
- h. Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung dari frekuensi, duration, priority, dan intensity.
- i. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.

Berdasarkan dari uraian teori Differential Association di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa, sekalipun tingkah laku kriminal itu merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai namun akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai. Oleh karena itu maka tingkah laku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan dari nilai-nilai yang sama.

3. Teori Konflik

Untuk memahami pendekatan teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat tradisional model yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (communal consensus). Konsensus model anggota-anggota pada umumnya sepakat tentang apa yang benar atau apa yang salah bahwa intisari hukum

merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul, jika individu terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau diterima masyarakat.

Interaksi antara berbagai kelompok dalam masyarakat menunjukkan konflik adalah normal suatu proses sosial kelompok-kelompok dikarenakan adanya kepentingan atau pertarungan kepentingan antara kelompok yang berbeda.⁴⁰ Kelompok tadi berusaha membela dan memperjuangkan antara anggota-anggotanya sedangkan konflik model mempertanyakan tidak hanya proses dimana orang menjadi kriminal tetapi juga tentang kelas dimana masyarakat memiliki kekuatan untuk membuat hukum.

Individu-individu yang terikat bersama dalam kelompok karena sosial animal dengan kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi mereka melalui tindakan kolektif, "Jika kelompok itu melayani anggotanya ia akan berusaha terus hidup tetapi jika tidak maka kelompok lain akan mengambil alih"

Berdasarkan teori ini penulis berpendapat bahwa, kejahatan dapat dilihat sebagai orientasi kepada kenyataan kelas-kelas sosial (*stratifikasi* dalam masyarakat). Kelompok-kelompok yang lebih mempunyai stratifikasi atas akan bertarung dengan stratifikasi bawah dalam melindungi kepentingannya.

4. Teori *Bio-Sosiologis*

⁴⁰Simandjuntak B, 1977, *Pengantar kriminologi dan Patologi sosial*, Tarsito, Bandung, hlm 31.

Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori-teori biologinya Lamroso. Teori ini disempurnakan oleh Enrico Ferry dengan menekankan bahwa kejahatan karena adanya hubungan yang erat antara faktor fisik, antropologis dan social :⁴¹

- Faktor-faktor fisik : suku bangsa, iklim, letak geografis, pengaruh musim, temperatur dan sebagainya.
- Faktor-faktor antropologis : umur, jenis kelamin, kondisi-kondisi organis, kondisi-kondisi psikologis dan sebagainya.
- Faktor-faktor sosial : rapatnya penduduk, kebiasaan susunan masyarakat, kondisi-kondisi ekonomi, kondisi industri dan sebagainya.

Berdasarkan dari Teori Bio-Sosiologis yang disempurnakan oleh Enrico Ferry ini penulis berpendapat atau penulis dapat menyimpulkan bahwa, teori ini memandang bahwa kejahatan bukan hanya disebabkan karena individu yang terlahir sebagai penjahat. Namun akan tetapi juga karena faktor-faktor lain yang ada disekitar orang-orang tersebut seperti faktor-faktor dari lingkungan individu tersebut hidup.

5. Teori Labeling

Teori ini memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat luas.

Dipandang dari perspektif ini, perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan. Jadi penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses dimana tanggapan terhadap

⁴¹Mahadar, 2005, *Viktimisasi Kejahatan Terhadap Pertanahan*, Jakarta, Laksbang Bessindo, hlm 51.

orang lain dari tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pandangan individu pada diri mereka sendiri.⁴²

Kejahatan tidaklah sepenuhnya merupakan hasil konflik antara kelompok dan masyarakat yang luas, dimana terdapat dua devisi yang bertentangan tentang tingkah laku yang layak. Coley Tomas dan Mead mereka berpendapat bahwa:⁴³

Berdasarkan uraian Teori Labeing diatas dapat di pahami bahwa, Pribadi manusia terbentuk melalui proses interaksi social dengan memisahkan yang baik dari yang buruk yang berlaku bisa dan yang menyimpang perhatiannya bukan pada akibat tetapi pada interaksi social dengan seseorang dan Tingkah laku manusia terbangun dari satu proses yang berlanjut dari aksi dan reaksi.

C. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.⁴⁴

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal

⁴²Abdul Wahid, 2002, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, hlm 12.

⁴³Ibid, hlm 14.

⁴⁴Barda Arief, Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 49.

mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

“Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal.” Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya- upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana ”penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa ”social welfare” dan ”social defence”.⁴⁵

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur ”penal” (hukum pidana) dan jalur ”non penal” (diluar hukum pidana).

a. Upaya Non Penal (preventif)

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha- usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Berdasarkan penanggulangan kejahatan secara preventif diatas, penulis berpendapat bahwa upaya preventif ini adalah langkah pertama dalam mencegah terjadinya kejahatan karna upaya preventif ini tidak hanya untuk pihak yang berwenang saja namun dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa keahlian khusus individu tersebut.

⁴⁵*Ibid*, hlm 77.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu :⁴⁶

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan- dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis .

Berdasarkan cara menanggulangi kejahatan menurut pendapat Barnest dan Teeters di atas, penulis berpendapat bahwa, kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik atau Dengan kata lain perbaikan keadaaneкономи yang mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi, dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

⁴⁶*Ibid*, hlm 78

Dilihat dari pengertian tindak pidana yang melanggar peraturan-peraturan pidana, diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh seseorang dengan bersalah, orang mana harus dapat dipertanggungjawabkan, dan hendaknya pihak kepolisian juga mampu mempertahankan dan melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, apabila kita mengkaji nya lebih jauh dari pada pengertian ini maka didalamnya terdapat beberapa unsur delik yakni :⁴⁷

- a. Adanya unsur perbuatan;
- b. Adanya unsur pelanggaran peraturan pidana;
- c. Adanya unsur diancam dengan ancaman hukuman;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;

Unsur delik yang merupakan unsur dari pada sifat melawan hukum adalah perbuatan, karena hanya perbuatan itulah yang hanya diikuti oleh unsur-unsur obyeknya, yang dapat dibagi kedalam beberapa bagian antara lain meliputi :⁴⁸

- a. Perbuatan tersebut telah dirumuskan oleh undang-undang;
- b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan;
- d. Perbuatan tersebut diancam pidana.

⁴⁷Ramli Atmasasmita, 1993, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung, Armico, hlm 79

⁴⁸Moelyatno, 1998, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Bintang Indonesia, Bandung. hlm 37-78.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan larangan tersebut disertai juga dengan ancaman, atau sanksi yang berupa hukuman pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan. Menentukan dengan cara bagai mana pengenaan pidana itu dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁴⁹

- Perbuatan pidana dalam arti yang luas dari manusia (aktif dan membiarkan).
- Sifat melawan hukum (baik yang bersifat subyektif maupun yang bersifat obyektif).
- Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang.
- Diancam dengan pidana.

Berdasarkan beerapa unsur di atas penulis berpendapat bahwa, menurut hukum positif yang diancam pidana dengan ketentuan undang-undang adalah perbuatan yang telah memenuhi empat unsure diatas dan perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan cara kesalahan dan ancaman pidana yang ada dalam hukum positif.

b. Upaya Jalur Hukum (Penal atau Represif)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif

⁴⁹Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT. Alumni, hlm 33.

dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub- sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini : ⁵⁰

1) Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu:

- a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.

⁵⁰Abdul Syani, 1989. *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, hlm. 139

- b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

Berdasarkan metode treatment diatas, penulis berpendapat bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran- pelanggaran yang mungkin lebih besar.

Adapun, yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititik beratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sediakala.

2) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, Maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang

semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

D. Tinjauan Umum Tentang Minuman Keras

D. 1 Pengertian Minuman Keras

Berikut ini pengertian minuman beralkohol dan minuman keras dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.86/MEN-KES/PER/IV/77 tentang minuman keras yakni :

Dijelaskan bahwa minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan A, minuman keras golongan B dan minuman keras golongan C.

Adapun pengertian minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, pada Pasal 1 dijelaskan :

Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pengertian di atas, yaitu bahwa minuman keras adalah minuman tersebut yang mengandung alkohol, jadi jika minuman tersebut tidak mengandung alkohol atau kadar alkoholnya kurang dari 1% tidak digolongkan sebagai minuman keras.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan minuman beralkohol adalah minuman yang memabukan bila diminum misalnya, Beer,

Anggur, dan sebagainya (Minuman yang mengandung alkohol dipakai sebagai minuman kesenangan), penjelasan Pasal 300 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan menurut penjelasan Pasal 537 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat memabukan misalnya Tuak, Saguweer dan sebagainya.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka menurut penulis ada 3 (tiga) golongan yang termasuk minuman keras, jika dilihat dari kadar alkoholnya yang dikandung suatu jenis minuman. Minuman yang kadar alkoholnya tidak seperti yang tercantum di atas, maka dianggap bukan sebagai minuman keras.

Istilah alkohol berasal dari bahasa Arab yaitu Al Kuhl yang artinya sari pati atau sari inti. Secara alami alkohol dapat terjadi pada buah-buahan yang terlalu masak seperti durian, nangka, mangga dan sebagainya. Secara buatan alkohol dapat dibentuk melalui proses fermentasi dari sumber-sumber karbohidat oleh mikroba yang ditumbuhkan pada bahan tersebut, mikroba ini banyak jenisnya, sehingga mampu menghasilkan bermacam-macam minuman beralkohol, misalnya *Saccaromyces cereviseae* yang telah lama digunakan dan *Kiuyyermeyeces Fragilis*.

Alkohol adalah zat psikoaktif yang bersifat adiktif, zat psikoaktif adalah golongan zat yang berkerja secara selektif terutama pada otak yang dapat menimbulkan perubahan pada perilaku, emosi, kognitif, persepsi dan kesadaran seseorang. Sedangkan adiksi atau adiktif adalah suatu keadaan kecanduan atau ketergantungan terhadap jenis zat sesuatu. Seseorang yang menggunakan alkohol mempunyai rentang respon yang berfluktuasi dari kondisi yang

ringan sampai yang berat. Alkohol yang dikenal sehari-hari yang terdapat dalam minuman adalah etanol dengan rumus kimia C_2H_5OH , etanol adalah jenis alkohol yang paling banyak digunakan dalam berbagai industri. Senyawa ini dapat diproduksi dari setiap bahan yang mengandung karbohidrat (gula). Bahan baku yang digunakan beragam seperti biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, tanaman palma dan limbah hasil pertanian. Industri etanol telah dikenal cukup lama dan diproduksi secara besar-besaran. Metode pembuatan alkohol dapat dilakukan dengan proses fermentasi atau dengan cara sintesis.

D. 2 Klasifikasi Minuman Keras

Klasifikasi, Jenis dan Standar Mutu Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut :⁵¹

- a. Golongan A ialah minuman keras kadar etanol (C_2H_5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus)
- b. Golongan B ialah minuman keras kadar etanol (C_2H_5OH) 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus)
- c. Golongan C ialah minuman keras kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Menurut penulis, hasil keputusan Muzarakah Nasional tentang Alkohol dalam produk Minuman yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 30 September 1993 bertempat di Jakarta, merumuskan beberapa pendapat beberapa diantaranya adalah :

- a. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol (etanol) yakni suatu senyawa kimia dengan rumus C_2H_5OH yang dibuat secara fermentasi dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat misalnya : biji - bijian, nira,

⁵¹Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2006 Tentang *Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran, Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol*.

dan lain sebagainya atau yang dibuat dengan cara distilasi hasil fermentasi yang termasuk didalamnya adalah minuman keras klasifikasi A, B dan C (Per. Menkes No. 86 / 1977).

- b. Anggur obat, anggur kolesom, arak obat dan minuman - minuman sejenis yang mengandung alkohol termasuk kedalam minuman beralkohol.
- c. Khamar adalah minuman yang memabukkan, termasuk kedalam minuman beralkohol.
- d. Berapapun kadar alkohol pada minuman beralkohol tetap dinamakan minuman beralkohol.
- e. Meminum minuman beralkohol, sedikit atau banyak maka hukumnya adalah haram. Demikian pula dengan kegiatan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, membeli dan menikmati hasil ataupun keuntungan dari perdagangan minuman beralkohol.

D. 3 Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Minuman Keras

Efek pada tubuh manusia yang ditimbulkan apabila terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras .⁵²

- a. Tergantungnya fungsi hati yang dapat mengakibatkan penyakit hepatitis.
- b. Terjadinya kerusakan lambung.
- c. Dapat mengakibatkan kerusakan jaringan tubuh.
- d. Meningkatkan resiko kanker payudara.
- e. Merusak fungsi otak (mental, hilang ingatan dan gila), jantung dan ginjal.
- f. Mengakibatkan stroke, kelumpuhan syaraf dan gagalnya fungsi organ. Mengakibatkan cacat dan gangguan pada pertumbuhan janin dan berakibat kematian.

⁵²Muchtadi TR, Sugiyono, 1992, *Ilmu Pengetahuan Bahan Pangan*, Bogor, PAU IPB, hlm 50.

Maka demikian menurut penulis, sangatlah berbahaya dampak atau efek yang ditimbulkan oleh alkohol ini maka agama apapun mengharamkan minuman ini beredar dan dikonsumsi oleh manusia. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 204 dan Pasal 300 antara lain : Pasal 204 (1) *“Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.* (2) *“Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”* Pasal 300 (1) *“Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus”* Angka 1. *“Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.* Aangka 2 *“Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”* Angka 3 *“jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.* Angka 4 *“jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu”.*